

Pergantian Kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung dan Kemenangan Pemilu Legislatif Kabupaten Bandung Tahun 2024

Nanang Suryana¹, Tedy Nurzaman^{1*}, Jonah Silas²

¹Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Padjadjaran

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi Email: tedynurzaman13@gmail.com

Abstract

Party leadership is an important aspect in showing the face of a political party to the public as voters. Several studies show that party leadership has a fairly strong influence in determining voting behavior (Liddle & Mujani, 2007). In the midst of the decentralization system in force in Indonesia, the presence of political parties at the regional level is thus a necessity, at least to reach voters at a more micro level. The touch between the community and the party at the regional level is certainly more intense compared to the party at the central level. The last four legislative elections in Bandung Regency (2004, 2009, 2014, and 2019), were always won by the Golkar party, until finally this dominance collapsed marked by the victory of the National Awakening Party (PKB) in the 2024 Bandung Regency legislative election. This victory occurred after the change in leadership of the National Awakening Party (PKB) at the regional level, in this case in Bandung Regency. Through the conceptual framework built by Stark (1996), related to the criteria for changing party leadership, this article aims to analyze in more depth how the change in leadership of the National Awakening Party of Bandung Regency can provide electoral incentives for the National Awakening Party's vote acquisition in the 2024 Bandung Regency legislative election. This article shows the factors of acceptance of party leaders by party members, electoral interest possessed by party leaders, and the competence of party leaders, which are supported by the factor of ownership of popular power as determinant factors that must be possessed by party leaders, as happened in the National Awakening Party (PKB) of Bandung Regency which succeeded in breaking the dominance of the Golkar Party in the 2024 Bandung Regency legislative election.

Keywords: *Change of Party Leadership, Popular Political Actors, PKB*

Abstrak

Kepemimpinan partai menjadi aspek penting dalam menunjukkan wajah partai politik kepada publik sebagai pemilih. Beberapa studi menunjukan kepemimpinan partai memiliki pengaruh cukup kuat dalam menentukan perilaku memilih (Liddle & Mujani, 2007). Di tengah sistem desentralisasi yang berlaku di Indonesia, kehadiran partai politik pada tingkatan daerah dengan begitu, menjadi suatu keharusan, paling tidak untuk menjangkau pemilih pada tingkatan yang lebih mikro. Sentuhan antara masyarakat

dengan partai pada tingkatan daerah tentunya menjadi lebih intens dibandingkan dengan partai pada tingkatan pusat. Empat pemilu legislatif Kabupaten Bandung terakhir (2004, 2009, 2014, dan 2019), selalu dimenangkan oleh partai golongan karya (Golkar), sampai akhirnya dominasi tersebut runtuh ditandai dengan kemenangan partai kebangkitan bangsa (PKB) pada pemilu legislatif Kabupaten Bandung tahun 2024. Kemenangan tersebut terjadi pasca pergantian kepemimpinan partai kebangkitan bangsa (PKB) di tingkatan daerah, dalam hal ini di Kabupaten Bandung. Melalui kerangka konseptual yang dibangun oleh Stark (1996), terkait kriteria pergantian kepemimpinan partai, artikel ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana pergantian kepemimpinan partai kebangkitan bangsa Kabupaten Bandung dapat memberikan insentif elektoral terhadap raihan suara partai kebangkitan bangsa pada pemilu legislatif Kabupaten Bandung tahun 2024. Artikel ini menunjukkan faktor penerimaan pemimpin partai oleh anggota partai, ketertarikan elektoral yang dimiliki pemimpin partai, dan kompetensi pemimpin partai, yang ditopang oleh faktor kepemilikan kekuatan populer menjadi faktor determinan yang harus dimiliki oleh pemimpin partai, sebagaimana yang terjadi pada partai kebangkitan bangsa (PKB) Kabupaten Bandung yang berhasil mematahkan dominasi partai Golkar pada pemilu legislatif Kabupaten Bandung tahun 2024.

Kata Kunci: Pergantian Kepemimpinan Partai, Aktor Politik Populer, PKB

Pendahuluan

Kontestasi politik di tingkat daerah menjadi salah satu wujud daripada pendalaman demokrasi. Kehadiran partai politik pada tingkatan daerah dengan begitu, menjadi suatu keharusan. Sebagai salah satu Infrastruktur politik, partai politik menjadi lembaga utama yang memiliki fungsi dalam mengagregasi kepentingan atau aspirasi publik (Sulaeman, 2015). Dalam kerangka elektoral, partai politik diharuskan meramu segala macam strategi politik untuk dapat memenangkan pemilihan. Citra yang ditampilkan partai politik selanjutnya menjadi dasar atas bangunan persepsi publik, sebagai *voters*, terhadap partai politik dan pada akhirnya akan mendorong pemilih untuk menentukan pilihan terhadap suatu partai. Lock dan Harris (1996), menjelaskan salah satu aspek sentral dari citra merek suatu partai adalah pemimpinnya.

Pada beberapa studi kepartaian di Indonesia, belakangan menunjukkan pergeseran dalam organisasi internal partai politik. Ditempatkannya figur-figur populer, menggeser figur-figur yang memiliki pengaruh politik dan terutama memiliki modal finansial yang cukup kuat, pada struktur maupun dalam pencalonan anggota legislatif, menjadi senjata paling ampuh bagi partai politik dalam berkontestasi pada pemilihan umum (Pemilu) (Mietzner, 2009). Disisi lain, juga didapati bahwa kepemimpinan partai memiliki pengaruh cukup kuat dalam menentukan perilaku memilih. Studi yang dilakukan oleh Liddle dan Mujani (2007), dalam temuannya menunjukkan adanya korelasi yang cukup kuat antara kepemimpinan partai dengan kecenderungan untuk memilih kandidat atau partai tertentu. Studi serupa juga dilakukan oleh Somer-Topcu (2017), temuannya menunjukkan pergantian kepemimpinan partai politik, pada satu sisi, memberikan insentif terhadap penyebaran informasi terkait posisi kebijakan partai, disisi

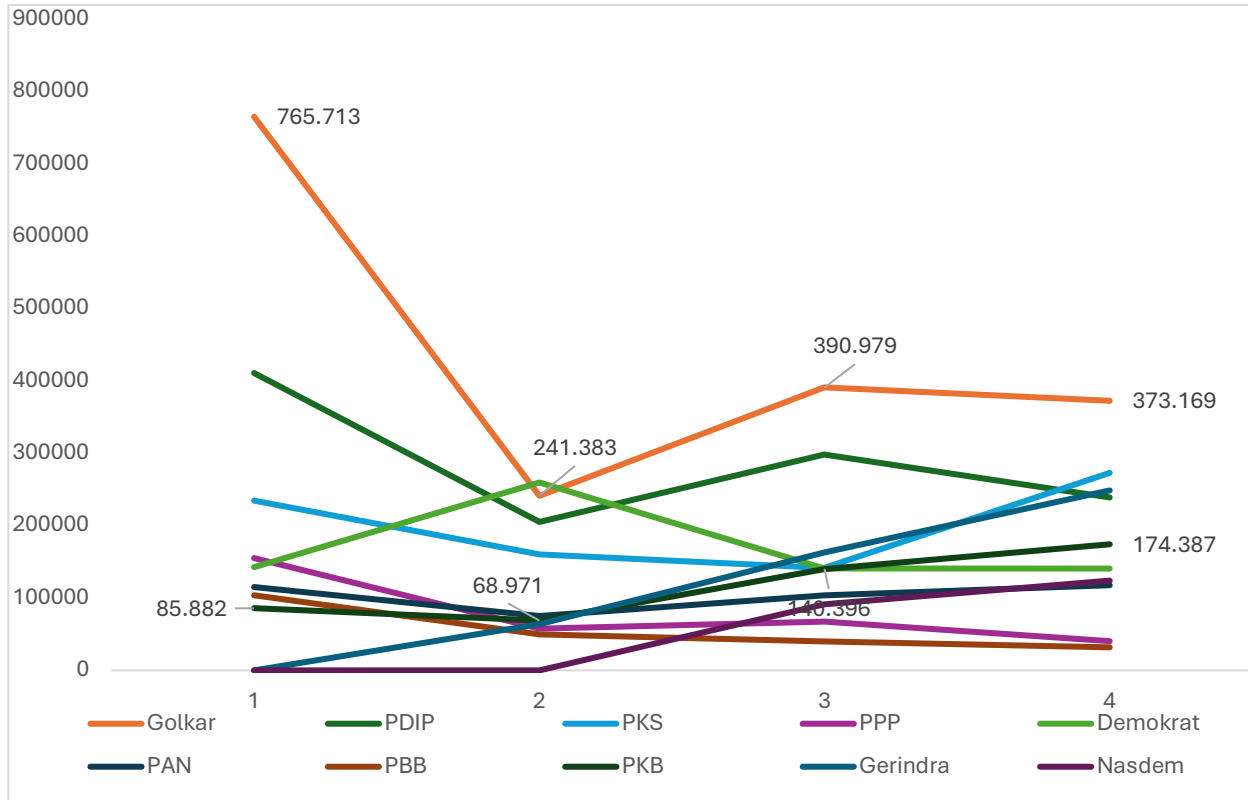
lain juga membuka ruang bagi kritik-kritik dari partai pesaing, terlepas daripada poin kedua, studi ini menunjukkan perubahan kepemimpinan partai rata-rata mengurangi ketidaksepakatan dengan pemilih tentang posisi kebijakan partai, efek tersebut sangat kuat ketika perubahan kepemimpinan partai disertai dengan perubahan posisi kebijakan partai politik.

Studi terkait juga dilakukan oleh Quinlan S dan McAllister I (2022), studi tersebut bertujuan untuk melihat sejauh mana kecenderungan memilih berdasarkan pemimpin partai politik, serta melihat tingkat perbedaan antara memilih pemimpin partai dengan partai politik. Temuan daripada studi tersebut menunjukkan bahwa pemilih yang dimotivasi oleh pemimpin paling lazim berasal dari kalangan non-partisan, dan dalam pemilihan dimana polarisasi ideologisnya cukup rendah, selain itu terdapat kemungkinan cukup besar bagi pemilih yang dimotivasi oleh pemimpin partai untuk mengalihkan suaranya pada pemilihan selanjutnya. Studi-studi tersebut menunjukkan bagaimana pengaruh pemimpin partai politik dengan beberapa faktor pendukung lain, seperti, popularitas serta persepsi terhadap sejauh mana pemimpin partai politik dapat merubah posisi kebijakan partai yang sejalan dengan aspirasi publik. Pemilih yang dimotivasi oleh pemimpin partai lazim ditemukan pada pemilihan yang polarisasi ideologisnya cukup rendah.

Mengacu pada studi yang dilakukan oleh Mayrudin (2017), menunjukkan terdapat pergeseran *positioning* ideologi partai-partai politik di Indonesia yang cenderung bergeser pada *catch-all party*. Studi tersebut juga menjelaskan fenomena bahwa terjadi perubahan posisi ideologis partai politik menjadi sangat pragmatis, dikarenakan pelibatan ideologis dalam menentukan posisi partai sudah semakin terkisis dan kabur. Dengan begitu polarisasi ideologis pada partai-partai politik di Indonesia cenderung rendah. Berdasarkan temuan-temuan studi tersebut, menjadikan landasan bahwa studi tentang kepemimpinan partai politik dan insentifnya bagi partai politik pada kontestasi pemilihan umum (Pemilu) menjadi penting untuk dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perubahan kepemimpinan partai politik pada tingkat daerah dapat memberikan insentif terhadap partai politik dalam kontestasi pemilihan umum (Pemilu) daerah. Sejalan dengan proses pendalaman demokrasi, dimana kontestasi politik tidak hanya berada pada tataran tingkat nasional, melainkan juga dilaksanakan pada tingkatan daerah.

Perpaduan antara figur populer dan kemampuan dalam mengagregasi aspirasi publik menjadi senjata bagi partai politik dalam berkontestasi pada pemilihan umum, sebagaimana salah satu tujuan utama partai politik adalah untuk meraih kekuasaan, tidak terkecuali pada tingkatan Kabupaten/Kota. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, sebagaimana Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah pemilih tertinggi, pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 dengan jumlah 35.714.901 pemilih (Wibawana, 2024). Pada pemilihan umum (Pemilu) 2024, Kabupaten Bandung juga menjadi salah satu kabupaten dengan jumlah pemilih tertinggi setelah Kabupaten Bogor, yakni mencapai 2.655.214 pemilih (kpu.go.id). Mengingat jumlah pemilih yang cukup gemuk, menjadikan Kabupaten Bandung sebagai salah satu *battleground* partai politik untuk dapat memaksimalkan keterpilihannya pada kontestasi pemilihan umum (Pemilu) legislatif.

Sejak pemilu legislatif Kabupaten Bandung tahun 2004 hingga 2019, partai Golkar hampir selalu mendapatkan raihan suara tertinggi pertama, hanya pada pemilu tahun 2009 partai Golkar menduduki raihan suara tertinggi kedua setelah partai Demokrat dengan selisih 18.471 suara, untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah.



Gambar 1. Tren Raihan Suara Partai pada Pemilihan DPRD Kab. Bandung
(Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2024)

- 1: Pemilu DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2004
- 2: Pemilu DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2009
- 3: Pemilu DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2014
- 4: Pemilu DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2019

Gambar diatas menunjukkan bahwa partai Golkar hampir selalu menjadi partai pemenang atau peraih suara tertinggi dalam pemilihan umum legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung, hanya pada pemilu legislatif tahun 2009 partai Golkar gagal menjadi pemenang. Partai Golkar, dengan begitu, berhasil menduduki kursi ketua DPRD Kabupaten Bandung selama 3 (tiga) periode (2004, 2014, dan 2019). Kemenangan pada dua lembaga, legislatif dan eksekutif, dalam 3 (tiga) periode menjadikan partai Golkar sebagai “partai penguasa” di Kabupaten Bandung.

Pemilihan umum legislatif tahun 2024, telah mematahkan dominasi partai Golkar pada lembaga legislatif daerah (DPRD) Kabupaten Bandung. Partai Kebangkitan Bangsa

(PKB) berhasil menggantikan partai Golkar pada kursi ketua DPRD, dengan raihan suara tertinggi, yakni, 447.466 suara, meninggalkan partai Golkar dengan raihan suara tertinggi kedua atau 316.830 suara (Mainaki, 2024). PKB telah mengalami kenaikan suara yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan pemilu legislatif 2019 lalu, dimana PKB hanya meraih 174.387 suara, dengan begitu kenaikan suara PKB mencapai 156,44%. Melemahnya dominasi partai Golkar, sejatinya telah ditunjukkan pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung pada tahun 2020 lalu, dimana, calon bupati yang diusung oleh partai Golkar, Kurnia Agustina istri dari Dadang M. Naser (bupati dua periode sebelumnya), dikalahkan oleh Dadang Supriatna yang diusung oleh PKB sebagai calon bupati (CNN Indonesia, 2021). Pudarnya dominasi partai Golkar dan naiknya PKB pada pucuk pimpinan, legislatif Kabupaten Bandung, menjadi suatu fenomena politik yang menarik untuk dianalisis lebih dalam. Tulisan ini mengambil *locus* di Kabupaten Bandung berdasar pada fenomena yang telah dipaparkan sebelumnya.

Metode

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan berbagai sumber data seperti perolehan suara, proses pergantian kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kabupaten Bandung, serta proses *branding* yang dilakukan oleh pimpinan partai PKB yang baru. Pengolahan data dengan melihat Tren Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa dari dua periode kepemimpinan yaitu: Cucun Ahmad Syamsurizal dan Dadang Supriatna, dan data relevan yang mendukung analisis dari artikel ini. Hasil analisis tersebut untuk menjawab dan menggambarkan patahnya dominasi partai Golkar digantikan oleh PKB pada pemilu Kabupaten Bandung 2024.

Artikel ini menggunakan dua pendekatan konseptual. Pertama terkait dengan proses pergantian kepemimpinan partai yang dibangun oleh Stark (1996) dengan melihat tiga kriteria; (1) berkaitan dengan penerimaan pemimpin partai oleh anggota partai politik tersebut, dalam hal ini pergantian pemimpin partai tidak menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai politik; (2) berkaitan dengan elektoral, sebagaimana tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan posisi di parlemen melalui pemilihan umum, sehingga kriteria pemimpin partai haruslah menarik secara elektoral; (3) kompetensi politik yang dimiliki oleh kandidat pemimpin partai politik, dimana kemampuan pemimpin dalam mengimplementasikan dan menyampaikan posisi kebijakan partai menjadi penting untuk dapat membangun persepsi publik terhadap partai politik. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis pergantian pimpinan PKB, serta keberhasilan PKB dalam meraih suara tertinggi pertama pada pemilu legislatif Kabupaten Bandung tahun 2024. Kedua terkait dengan aktor politik populer yang dibangun oleh Savirani, dkk (2014). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisa aktor politik populer dalam pusran politik berbasis figur "*figure based politics*" di Kabupaten Bandung, yang nantinya akan mendukung analisa mengenai pergantian pimpinan partai politik serta pengaruhnya. Savirani, dkk (2014), menjelaskan aktor politik populer adalah, individu atau agensi yang membentuk keterwakilan populer, dan mengakar pada kekuatan populer tersebut, atau dalam hal ini, aktor yang menguasai pengambilan keputusan dan mampu menguasai wacana publik. Kekuatan figur politik, dengan begitu, tidak hanya dibangun berdasarkan popularitas semata, melainkan juga dibangun

berdasarkan pada peran sebagai agensi yang mampu mewakili kepentingan popular, sehingga selanjutnya bersandar pada kekuatan popular tersebut.

Hasil dan Diskusi

Pergantian Kepemimpinan Partai dan Kemenangan PKB di Kabupaten Bandung

Lock dan Harris (1996), menjelaskan salah satu aspek sentral dari citra merek suatu partai adalah pemimpinnya. Bynander dan Hart (2008); dengan nada yang sama, menjelaskan bahwa, perubahan kepemimpinan partai merupakan bentuk dari *rebranding* partai, serta pembaruan organisasi. Gomibuchi (dalam Somer-Topcu, 2017), Hadirnya pemimpin baru bersamaan dengan dinamisme yang terjadi pada partai politik, memancing perhatian media. Intensitas wawancara oleh media terhadap pemimpin baru (berbicara tentang tujuan sebuah partai, dan untuk membedakan gaya kepemimpinannya dengan pendahulunya), pada gilirannya memfasilitasi identifikasi pemilih terhadap partai dan kebijakannya. Lebih banyak informasi tentang partai setelah perubahan kepemimpinan dapat membantu pemilih mengembangkan persepsi bersama tentang posisi kebijakan partai. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan identifikasi pemilih terhadap figur pemimpin partai belakangan semakin menguat.

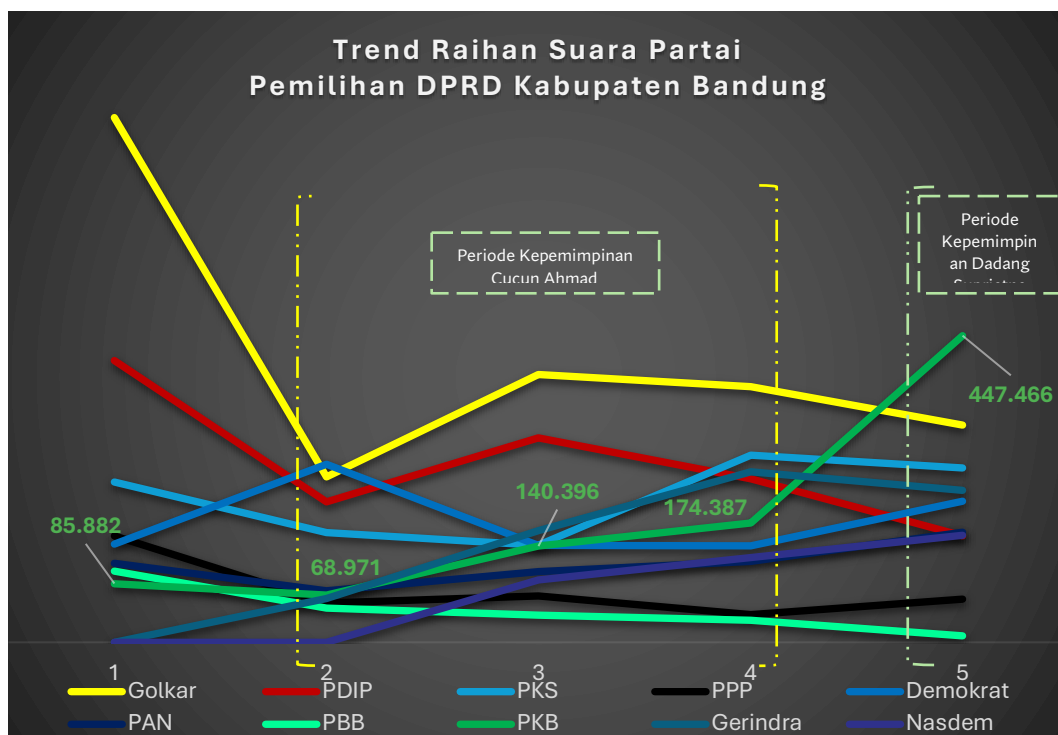
Stark (1996) telah membangun kerangka analisis mengenai pergantian kepemimpinan partai yang setidaknya harus memenuhi tiga kriteria, Pertama, berkaitan dengan penerimaan pemimpin partai oleh anggota partai politik tersebut, dalam hal ini pergantian pemimpin partai tidak menimbulkan perpecahan dalam tubuh partai politik. Kedua, berkaitan dengan elektoral, sebagaimana tujuan partai politik adalah untuk mendapatkan posisi di parlemen melalui pemilihan umum, sehingga kriteria pemimpin partai haruslah menarik secara elektoral. Ketiga, kompetensi politik yang dimiliki oleh kandidat pemimpin partai politik. Proses peralihan kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada level Kabupaten Bandung, tidak menghadapi dinamika politik ekstrem yang mengakibatkan perpecahan dalam tubuh internal partai PKB Kabupaten Bandung.

Dadang Supriatna yang notabene merupakan kader baru partai, bahkan umurnya belum menginjak genap satu tahun sebagai anggota partai PKB, telah diterima dan dipercayai oleh para anggota partai untuk dapat menduduki kursi pimpinan partai kebangkitan bangsa (PKB) Kabupaten Bandung. Proses pemilihan yang dilakukan secara aklamasi menandakan minimnya konflik perebutan kekuasaan atau pertentangan atas suatu calon, dalam hal ini Dadang Supriatna, pada tubuh internal PKB Kabupaten Bandung, hal tersebut dikonfirmasi oleh pernyataan Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung sebelumnya, Cucun Ahmad Syamsurijal yang menyatakan: *"..... proses peralihan kekuasaan PKB Kabupaten Bandung, berawal dari saling menghargai, saling menyadari, dan tanpa ada perebutan kekuasaan yang berakhir perpecahan"*. Paling tidak sampai saat artikel ini ditulis, peneliti tidak menemukan konflik yang berujung perpecahan, dalam hal ini dualisme kepengurusan, pada partai kebangkitan bangsa Kabupaten Bandung.

Kepemilikan atas tingkat elektoral pribadi Dadang Supriatna menjadi faktor yang juga menjelaskan pergantian kepemimpinan partai kebangkitan bangsa Kabupaten Bandung. Sebagaimana telah dijelaskan Stark (1996), salah satu kriteria pergantian

kepemimpinan partai, bersandar pada kepentingan strategis partai, salah satunya memenangkan pemilihan umum, dengan begitu, kriteria kandidat pemimpin partai harus memiliki ketertarikan secara elektoral. Ketertarikan elektoral yang dimiliki kandidat pemimpin partai pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kemenangan bagi partai dalam pemilihan umum. Kemenangan kader partai kebangkitan bangsa, yang diwakili oleh Dadang Supriatna, dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung tahun 2020, menjadi kemenangan pertama sejak era pemilihan kepala daerah secara langsung atau sejak tahun 2005, sekaligus juga mampu meruntuhkan dominasi partai golongan karya yang selalu mengisi kursi kepala daerah di Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut menjadi salah satu faktor utama yang dapat menjelaskan terpilihnya Dadang Supriatna sebagai pemimpin partai kebangkitan bangsa Kabupaten Bandung.

Terpilihnya Dadang Supriatna sebagai ketua DPC PKB Kabupaten Bandung, memberikan dampak elektoral yang cukup signifikan bagi kemenangan partai. Raihan suara PKB pada pemilihan DPRD Kabupaten Bandung tahun 2019 meraih sebanyak 174.387 suara, pada pemilihan DPRD Kabupaten Bandung tahun 2024 raihan suara PKB mengalami kenaikan yang cukup signifikan mencapai 156,44%, atau 447.466 suara di pemilihan tahun 2024. Kenaikan raihan suara tersebut juga mengantarkan PKB sebagai partai dengan raihan suara tertinggi kesatu atau sebagai partai pemenang pada pemilihan DPRD Kabupaten Bandung tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2. Trend Perolehan Suara Partai Pemilihan DPRD Kab. Bandung (Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2024)

- 1: Pemilu DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2004
- 2: Pemilu DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2009
- 3: Pemilu DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2014
- 4: Pemilu DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2019
- 5: Pemilu DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2024

***Grafik tersebut hanya menampilkan 10 partai besar dengan raihan suara tertinggi sejak pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bandung tahun 2004 – 2024*

Gambar diatas menunjukkan raihan suara partai pemilihan DPRD Kabupaten Bandung dari tahun 2004 hingga 2024, serta perbandingan raihan suara partai kebangkitan bangsa dalam dua periode kepemimpinan PKB Kabupaten Bandung, Cucun Ahmad Syamsurijal 2009 – 2020 dan Dadang Supriatna 2020 – sekarang. Bila dicermati lebih mendalam, pada periode kepemimpinan Cucun Ahmad Syamsurijal, raihan elektoral PKB pada pemilihan umum DPRD Kabupaten Bandung, secara peringkat berdasarkan raihan suara tertinggi menempati urutan ke enam (6) pada pemilu legislatif daerah tahun 2009 dan 2014, dan urutan ke lima (5) pada tahun 2019, sedangkan pada periode kepemimpinan Dadang Supriatna, meskipun hanya terpotret dalam satu kali pemilihan DPRD, berhasil menempati posisi pertama (1) dengan raihan suara tertinggi, mengalahkan partai Golkar yang selama empat (4) kali pemilihan DPRD Kabupaten Bandung, mendominasi raihan suara tertinggi pertama. Raihan elektoral yang didapatkan oleh PKB pada pemilihan DPRD Kabupaten Bandung tahun 2024, melengkapi kriteria elektoral yang dirumuskan oleh Stark (1996), dimana pemimpin partai terpilih harus dapat memberikan kemenangan bagi partai dalam pemilihan umum.

Faktor kompetensi politik yang dimiliki oleh kandidat pemimpin partai, akan melengkapi penjelasan-penjelasan yang telah disusun sebelumnya. Model kriteria kepemimpinan partai yang dibangun oleh Stark (1996), faktor kompetensi pemimpin partai, mengacu pada kemampuan pemimpin dalam mengimplementasikan kebijakan partai. Kriteria tersebut berangkat dari kepentingan strategis partai politik untuk menyampaikan posisi kebijakan partainya pada publik, dengan begitu, diharapkan dapat turut serta membangun persepsi publik atas partai politik sebagai lembaga agregasi kepentingan publik. Partai politik akan mampu mengimplementasikan kebijakannya dengan leluasa ketika memasuki arena pemerintahan. Titik tekan faktor kompetensi pemimpin partai adalah, sejauh mana kebijakan partai dapat diimplementasikan pada arena pemerintahan oleh pemimpin partai tersebut.

Bahasan sebelumnya telah menjelaskan bagaimana faktor penerimaan dan elektoral menjadi landasan dalam pergantian kepemimpinan partai kebangkitan bangsa Kabupaten Bandung. Dadang Supriatna yang notabene adalah kepala daerah terpilih, menjadi penting ketika partai berupaya membangun persepsi publik atas posisinya melalui implementasi kebijakan partai. Mengacu pada dokumen Anggaran Dasar PKB, disebutkan bahwa prinsip dasar perjuangan partai disandarkan pada nilai-nilai islam *Ahlusunnah Waljama'ah*, hal tersebut menandakan bahwa PKB merupakan salah satu partai yang berbasis keagamaan. Berdasarkan pengelompokan partai yang diajukan oleh

Dhakidae (1999), di Indonesia terdapat dua kelompok partai, yakni, kelompok partai kebangsaan dan kelompok partai keagamaan.

Beberapa penelitian belakangan menunjukkan kecenderungan partai-partai di Indonesia yang bergeser pada posisi *catch-all party*, sehingga mengaburkan pengelompokan partai di Indonesia (Mayrudin, 2017), kesimpulan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian terkait perilaku pemilih di Indonesia yang dilakukan oleh Mujani, dkk (2019), perilaku pemilih pasca demokratisasi di Indonesia cenderung dimotivasi oleh kalkulasi untung dan rugi bagi si pemilih, selain itu, masyarakat Indonesia juga cenderung mengevaluasi kinerja pemerintahan berdasarkan aspek ekonomi bukan pada platform atau ideologi partai. Perihal ideologi partai bukanlah menjadi pertimbangan utama bagi pemilih dalam memilih suatu partai, dengan begitu, agaknya sulit untuk melihat perbedaan-perbedaan menonjol terkait kebijakan partai yang sesuai dengan ideologi atau pengelompokan antara satu kelompok atau partai dengan yang lainnya.

Kebijakan partai berbasis ideologi pada akhirnya tidak terlalu muncul pada diskursus pemerintahan, digantikan oleh kebijakan yang berbasis pada “keberpihakan terhadap rakyat” sehingga dapat memberikan keuntungan elektoral bagi partai politik itu sendiri, terutama pada aspek ekonomi masyarakat. Faktor kompetensi pemimpin dalam kerangka stark, pada tulisan ini tidak difokuskan pada implementasi kebijakan partai berbasis ideologi partai, melainkan berbasis pada kebijakan yang memiliki “keberpihakan terhadap rakyat”, sesuai dengan kecenderungan perilaku pemilih di Indonesia, termasuk Kabupaten Bandung, yang dimotivasi oleh kalkulasi untung dan rugi, serta kecenderungan pada evaluasi kinerja pemerintahan berdasarkan aspek ekonomi.

Kemenangan dan lonjakan raihan suara partai kebangkitan bangsa dalam pemilihan DPRD Kabupaten Bandung tahun 2024, erat kaitannya dengan kepemimpinan Dadang Supriatna, meskipun bukan satu-satunya faktor, tetapi tentu tidak bisa dikesampingkan. Sejak memasuki pemerintahan, dalam hal ini bupati Kabupaten Bandung, terdapat 13 program strategis utama yang diimplementasikan oleh Dadang Supriatna, lihat tabel di bawah ini.

Tabel 1. Program Strategis Dadang Supriatna

No.	13 Program Strategis Dadang Supriatna
1	Pemberian insentif bagi nguru ngaji yang disertai dengan jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan jaminan ketenagakerjaan
2	Pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan tanpa jaminan
3	Insentif bagi pelindung masyarakat (linmas), ketua rukun tetangga (RT), ketua rukun warga (RW), dan pengurus pemberdayaan kesejahteraan keluarga, serta program peningkatan insentif pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD)
4	Beasiswa untuk anak-anak Hafidz Al-qur'an dan pelajar berprestasi

No.	13 Program Strategis Dadang Supriatna
5	Pendidikan bermuatan lokal yaitu, pendidikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pendidikan bahasa Sunda dan Budaya Lokal, serta mengaji dan menghafal Al- Quran, untuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP)
6	Penambahan pembangunan infrastruktur pendidikan sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas
7	Pembangunan rumah sakit daerah baru
8	Bantuan pembangunan rumah tidak layak huni untuk masyarakat kurang mampu
9	Menghadirkan Mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) di setiap desa
10	Pemberian insentif Ustadz/Ustadzah, Takmir, dan Marbot atau pengelola mesjid
11	Pemberian asuransi dan subsidi kepada petani melalui kartu tani Sibedas
12	Pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk lahan pertanian padi sawah di Kab. Bandung
13	Rembug Desa

(Sumber: Hasil olah data peneliti, 2024)

Tabel diatas menunjukkan tiga belas (13) program strategis yang telah dijalankan oleh Dadang Supriatna selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung. Ditinjau lebih dalam program-program tersebut, hampir seluruhnya atau delapan program bersifat bantuan yang ditujukan langsung terhadap masyarakat, sisanya terbagi pada pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Beberapa program bantuan langsung juga secara spesifik diberikan kepada pegiat-pegiat keagamaan, khususnya yang beragama Islam, seperti halnya, pemberian insentif bagi nguru ngaji yang disertai dengan jaminan kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan jaminan ketenagakerjaan, beasiswa untuk anak-anak Hafidz Al-qur'an dan pelajar berprestasi, dan pemberian insentif Ustadz/Ustadzah, Takmir, dan Marbot atau pengelola masjid. Program strategis Dadang Supriatna, setidaknya dimotivasi oleh dua hal, pertama distribusi kemampuan ekonomi, dan kedua, berbasis pada keagamaan, khususnya agama Islam.

Implementasi program-program Dadang Supriatna menjadi manifestasi atas apa yang menjadi tuntutan masyarakat, sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, terdapat kecenderungan pemilih yang dimotivasi oleh kalkulasi untung dan rugi secara materiil. Lebih spesifik beberapa program tersebut juga ditunjukkan kepada masyarakat yang beragama Islam, sebagaimana dari 3.718.660 penduduk Kabupaten Bandung, 98% (BPS.Kabupaten.Bandung) diantara-Nya merupakan masyarakat yang memeluk agama Islam. Melalui kombinasi dua jenis program, ekonomi dan keagamaan, Dadang Supriatna bukan hanya berhasil mengimplementasikan kebijakan partai kebangkitan bangsa, namun juga berhasil memberikan insentif bagi partai dalam bentuk kenaikan suara yang signifikan pada pemilu legislatif Kabupaten Bandung tahun 2024.

Kemenangan Aktor Populer Dadang Supriatna

Kemenangan Dadang Supriatna sebagai calon bupati yang diusung oleh PKB, bukan hanya berhasil mematahkan dominasi partai golkar, melainkan juga berhasil mematahkan trah dinasti politik yang telah dibangun oleh Obar Sobarna yang sempat dilanjutkan oleh Dadang M. Naser selama dua periode dan pada pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2020 gagal dilanjutkan oleh Kurnia Agustina, istri Dadang M. Naser. Kegagalan dalam melanjutkan estafet kekuasaan dari Dadang M. Naser kepada Kurnia Agustina, menjadi titik awal pudarnya dominasi partai golkar di Kabupaten Bandung.

Karir Dadang Supriatna dalam pemerintahan Kabupaten Bandung telah dimulai sejak dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Tegalluar Kabupaten Bandung selama dua periode (1998 – 2006 dan 2006 – 2012) (Dedi, 2022). Belum selesai menjabat kepala desa pada periode yang kedua, Dadang Supriatna berhasil menduduki jabatan anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Bandung dari partai golkar selama dua periode (2009 – 2014 dan 2014 – 2019), dan berhasil menduduki jabatan anggota legislatif (DPRD) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019, sebelum memutuskan untuk maju dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Bandung pada tahun 2020 (Dedi, 2022). Keberhasilan dalam memenangkan kontestasi legislatif selama tiga kali berturut-turut (2009, 2014, dan 2019), serta pengalaman dalam pemerintahan menjadikan modal awal Dadang Supriatna dalam pencalonan Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020.

Pemilukada Kabupaten Bandung tahun 2020 diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan calon wakil bupati (lihat gambar 3 Daftar Calon Bupati & Calon Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020).



Gambar 3. Daftar Calon Bupati & Calon Wakil Bupati Kabupaten Bandung Tahun 2020
(Sumber: kab-bandung.kpu.go.id, 2024)

Dadang Supriatna yang sebelumnya merupakan kader partai golkar, harus berpindah partai ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mendapatkan tiket maju sebagai calon bupati Kabupaten Bandung, setelah partai golkar memutuskan untuk mengusung Kurnia Agustina, yang merupakan istri dari Dadang M. Naser (bupati petahana). Keputusan tersebut diambil dalam waktu yang berdekatan dengan

pelaksanaan pemilukada, dimana keputusan tersebut diambil pada bulan juli 2020, sedangkan tahapan pelaksanaan pemilukada dimulai pada bulan september 2020 atau dua bulan sebelum pelaksanaan tahapan pemilukada (Endrawan, 2020).

Meskipun pencalonan Dadang Supriatna tidak didukung oleh partai golkar sebagai partai penguasa di Kabupaten Bandung, popularitas (kedikenalan) dan elektabilitas (keterpilihan) yang dimiliki Dadang Supriatna berhasil mengantarkan dirinya menjadi pemenang pemilukada Kabupaten Bandung tahun 2020, mengalahkan dua pasangan calon lainnya. Dadang Supriatna yang berpasangan dengan Sahrul Gunawan berhasil meraih 56,01% suara, jauh meninggalkan pasangan Kurnia Agustina dengan Usman Sayogi, dan Yena Iskandar dengan Atep (lihat tabel 2 dibawah)

Tabel 2. Perolehan Suara Pasangan Calon Pilkada Kab. Bandung Tahun 2020

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kurnia Agustina-Usman Sayogi	511.413 (30,85%)
2	Yena Iskandar Masoem-Atep	217.780 (13,14%)
3	Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan	928.602 (56,05%)

(Sumber: kab-bandung.kpu, 2024)

Popularitas dan Elektabilitas Dadang Supriatna telah tergambar pada hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada bulan November 2020, atau satu bulan sebelum hari pemilihan, menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Dadang Naser (suami daripada Kurnia Agustina) mencapai angka 70%, namun, angka tersebut tidak mampu dikonversikan pada elektabilitas atau keterpilihan personal Kurnia Agustina yang hanya mencapai 27,5%, sedangkan elektabilitas pesaingnya, Dadang Supriatna mencapai 40%, dan Yena Iskandar 11,6% (Ripaldi, 2020). Dari segi popularitas atau kedikenalan, Dadang Supriatna mendapatkan angka 68,2% unggul dibandingkan dengan Kurnia Agustina yang mendapatkan angka 67,0% (Perdana & Ika, 2020). Survei tersebut juga menunjukkan, bahwa, perpindahan Dadang Supriatna sebagai calon bupati Kabupaten Bandung dari partai golkar kepada partai kebangkitan bangsa (PKB), tidak otomatis berpengaruh terhadap mengecilnya peluang keterpilihan figur Dadang Supriatna sebagai calon bupati.

Sejalan dengan temuan daripada penelitian yang dilakukan oleh Savirani, dkk (2014), bahwa terdapat kecenderungan politik Indonesia yang berbasis pada individu atau "*figure-based poitics*" yang menduduki posisi publik, seperti pemimpin daerah (provinsi atau kabupaten/kota). Individu yang dimaksud dalam penelitian tersebut merupakan agensi yang membentuk keterwakilan populer, dan mengakar pada kekuatan populer tersebut, atau dalam hal ini, aktor yang menguasai pengambilan keputusan dan mampu menguasai wacana publik. Kekuatan figur politik, dengan begitu, tidak hanya dibangun berdasarkan popularitas semata, melainkan juga dibangun berdasarkan pada peran sebagai agensi yang mampu mewakili kepentingan populer, sehingga selanjutnya bersandar pada kekuatan populer tersebut. Posisi publik (kepala desa & anggota DPRD) yang sempat diduduki oleh Dadang Supriatna selama 2 (dua) periode di Kabupaten Bandung, serta popularitas dirinya sebagai calon bupati Kabupaten Bandung tahun 2020, menjadi faktor determinan dalam kemenangan Dadang Supriatna mengalahkan calon populer lain. Peranan sebagai agregator kepentingan populer dilakukan oleh Dadang Supriatna sejak dirinya menduduki kepala desa

tegalluar selama dua periode berturut-turut, serta anggota DPRD Kabupaten Bandung dua periode berturut-turut. Dua posisi publik yang berbeda dan selalu dimenangkan dalam kurun waktu dua periode berturut-turut menjadi salah satu tolak ukur dalam menjelaskan kekuatan Dadang Supriatna yang bersandar pada kekuatan populer, atas keberhasilannya sebagai wakil daripada kepentingan populer tersebut. Berbeda hal nya dengan Kurnia Agustina, yang belum pernah menduduki posisi publik dengan kekuatan untuk dapat berperan sebagai agensi daripada kepentingan populer, sehingga tidak memiliki akar yang kuat terhadap kelompok populer tersebut.

Kemenangan Dadang Supriatna pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung tahun 2020, juga berhasil mengantarkan dirinya pada pucuk pimpinan partai kebangkitan bangsa Kabupaten Bandung. Kekuatan populer serta posisi jabatan publik yang dimilikinya berhasil dimanfaatkan sebagai salah satu upaya dalam melakukan *branding* partai kebangkitan bangsa melalui program-program unggulan yang dijalankan selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Bandung.

Kesimpulan

Proses peralihan kepemimpinan partai kebangkitan bangsa (PKB) Kabupaten Bandung yang tanpa diwarnai konflik internal partai, memberikan pengaruh positif pada proses regenerasi partai, serta iklim organisasi. Kepemilikan kekuatan populer serta posisinya sebagai pejabat publik, menjelaskan bagaimana Dadang Supriatna secara personal memiliki ketertarikan elektoral yang dapat memberikan pengaruh pada raihan elektoral partai. Posisinya sebagai pejabat publik, juga menjadi ruang dalam memberikan pesan pada publik terhadap posisi kebijakan PKB Kabupaten Bandung. Dengan begitu Dadang Supriatna memiliki seluruh kriteria proses peralihan kepemimpinan partai yang telah dirumuskan oleh Stark (1996). Kenaikan suara PKB Kabupaten Bandung yang signifikan pada pemilu legislatif Kabupaten Bandung tahun 2024, menjadi bukti bahwa Dadang Supriatna berhasil membangun persepsi publik yang selanjutnya memberikan dampak elektoral bagi partai.

Referensi

- Bynander, F., & Hart, P. (2008). The art of handing over: (Mis)managing party leadership successions. *Government and Opposition*, 43(3), 385–404.
- CNN Indonesia. (2021, March 20). *Dadang-Sahrul Gunawan Ditetapkan Pemenang Pilkada Bandung*. CNN Indonesia.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210320190613-32-620030/dadang-sahrul-gunawan-ditetapkan-pemenang-pilkada-bandung>
- Dhakidae, D. (1999). *Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi, dan Program*. Kompas.
- Endrawan, S. (2020, July 24). *Dadang Supriatna Siap Meninggalkan Kursi Dewan Demi Mencalonkan Bupati Bandung*. Opininews.
<https://www.opininews.com/nasional/1102/dadang-supriatna-siap-meninggalkan-kursi-dewan-demi-mencalonkan-bupati-bandung.html>
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia. *Comparative Political Studies*, 40(7), 832–857.
<https://doi.org/10.1177/0010414006292113>

- Lock, A., & Harris, P. (1996). Political marketing: vive la difference! *European Journal of Marketing*, 30, 14–24.
- Mainaki, D. (2024, March 21). RRI.co.id - PKB Rajai Perolehan Suara Pemilu di Kabupaten Bandung. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/pemilu/600552/pkb-rajai-perolehan-suara-pemilu-di-kabupaten-bandung>
- Mayrudin, Y. M. (2017). Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi: Studi Tentang Pergeseran Positioning Ideologi Partai-Partai Politik Peserta Pemilu 2014. *Journal of Governance*, 2(2), 163–185.
- Mietzner, M. (2009). Political Opinion Polling in Post-Authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation? *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde*, 165(1), 95–126.
- Mujani, S., Liddle, R. W., & Ambardi, K. (2019). *Kaum Demokrat Kritis: Analisis Perilaku Pemilih Indonesia Sejak Demokratisasi*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) .
- Perdana, P. P., & Ika, A. (2020, November 16). Survei LSI: Pasangan Dadang - Sahrul Gunawan Berpeluang Menang Pilkada Kabupaten Bandung Halaman all - Kompas.com. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/11/16/14175271/survei-lsi-pasangan-dadang-sahrul-gunawan-berpeluang-menang-pilkada?page=all>
- Quinlan, S., & McAllister, I. (2022). Leader or Party? Quantifying and Exploring Behavioral Personalization 1996–2019. *Party Politics*, 28(1), 24–37. <https://doi.org/10.1177/13540688211019239>
- Ripaldi, D. (2020, November 16). Survei LSI: Pemilih Pilkada Kabupaten Bandung Lebih Pertimbangan Personal bukan Partai - Pemilu Liputan6.com. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/4409745/survei-lsi-pemilih-pilkada-kabupaten-bandung-lebih-pertimbangan-personal-bukan-partai?page=2>
- Savirani, A., Prabawati, D., Hiariej, E., Hanif, H., Santoso, P., Sari, R. K., Hapsari, W., Samadhi, W. P., Törnquist, O., & Stokke, K. (2014). *Demokrasi di Indonesia: Antara Patronase dan Populisme*.
- Somer-Topcu, Z. (2017). Agree or Disagree: How do Party Leader Changes Affect the Distribution of Voters' Perceptions. *Party Politics*, 23(1), 1–10. <https://doi.org/10.1177/1354068816655568>
- Stark, L. P. (1996). *Choosing a Leader: Party Leadership Contests in Britain from Macmillan to Blair*. Macmillan.
- Sulaeman, A. (2015). Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala Daerah. *Cosmogov*, 1(1), 12–24.
- Wibawana, W. A. (2024, January 19). Data Jumlah Pemilih Pemilu 2024 di Seluruh Indonesia dan Luar Negeri. Detiknews. <https://news.detik.com/pemilu/d-7150264/data-jumlah-pemilih-pemilu-2024-di-seluruh-indonesia-dan-luar-negeri>